

From Demonstration to Anarchy: The October 1968 Surabaya Incident in Newspaper

Dari Demonstrasi Ke Anarki: Peristiwa Surabaya Oktober 1968
Dalam Pemberitaan Surat Kabar

Tiara Paramita ^{1a}, Nugroho Bayu Wijanarko ^{2b}

¹²Universitas Negeri Semarang

^atiaraparamita23@students.unnes.ac.id

^bnugrohowijanarko@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

tiaraparamita23@students.unnes.ac.id

How to Cite: Tiara Paramita. (2026). From Demonstration to Anarchy: The October 1968 Surabaya Incident in Newspaper. doi: 10.36526/js.v3i2.9329

Received :10-05-2026
Revised : 03-06-2026
Accepted : 30-07-2026

Keywords:

Surabaya Incident,
Newspaper Reporting,
New Order, Communism

Abstract

The Surabaya Incident of October 1968 was a significant episode in the early New Order period that began with youth and student demonstrations protesting the execution of two Indonesian Marine Corps (KKO-AL) members, Harun and Usman, by the Singapore government. The demonstrations subsequently escalated into widespread unrest, resulting in property destruction, casualties, arrests, and social and economic disruption. This study aims to examine the chronology and impacts of the incident and analyze how *Suara Merdeka* and *Kompas* reported and constructed the event through an anti-communist framework. This research employs the historical method, consisting of heuristic, source criticism, interpretation, and historiography, using newspaper reports published between October and November 1968 as primary sources. The findings show that both newspapers initially portrayed the incident as a demonstration that developed into unrest and was subsequently associated with alleged involvement of former G30S/PKI elements and foreign political forces. The reliance on official military sources contributed to strengthening the anti-communist framework used to explain the causes and actors behind the unrest. The novelty of this study lies in analyzing how the Surabaya Incident was gradually reconstructed in newspaper reporting from a local demonstration into part of a broader anti-communist narrative within the political context of the early New Order.

PENDAHULUAN

Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, Indonesia memasuki fase transisi politik yang ditandai dengan konsolidasi kekuasaan rezim Soeharto dalam kerangka pemerintahan Orde Baru. Pemerintah berupaya menciptakan stabilitas keamanan dan politik melalui penguatan peran militer serta penertiban terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu keamanan negara (Farchan, 2022). Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian terhadap peristiwa 1965 yang pada masa itu dianggap didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) (Aryani, 2022). Peristiwa tersebut kemudian diikuti dengan pembubaran PKI serta tindakan pembersihan terhadap anggota, simpatisan, maupun pihak-pihak yang dituduh berafiliasi dengan komunisme (Asad, 2009).

Penegasan arah politik diperkuat melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang menetapkan pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini semakin mempertegas orientasi politik pemerintahan Orde Baru yang menempatkan stabilitas dan keamanan sebagai prioritas utama (Masril, 2020). Upaya pemerintah Orde Baru dalam menjaga stabilitas juga dilakukan melalui kontrol terhadap arus informasi. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, sekitar tahun 1966

hingga awal 1970-an hampir tidak ada masalah antara pers dengan pemerintah. Pers pada periode ini masih diberi ruang untuk meliput berbagai peristiwa, selama tidak bertentangan dengan garis kekuasaan yang secara tegas bersifat anti-komunis (Zainal, 2019). Pemerintah memanfaatkan narasi anti-komunisme sebagai instrumen kontrol sosial, termasuk dalam mengarahkan pemberitaan media. Kebijakan pemerintah yang menempatkan media dalam poros politik tertentu menyebabkan munculnya berbagai media yang memiliki afiliasi politik dan membawa kepentingannya masing-masing (Farinuddin, 2023). Dalam konteks ini, Peristiwa di Surabaya pada Oktober 1968 merepresentasikan bagaimana narasi anti-komunisme digunakan untuk membingkai sebuah konflik yang terjadi di kota Surabaya.

Peristiwa Surabaya terjadi pada 21 Oktober 1968, bermula dari demonstrasi yang pada awalnya merupakan aksi spontanitas yang dilakukan massa pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus protes atas eksekusi dua anggota KKO-AL (Korps Komando Angkatan Laut), Harun dan Usman di Singapura. Namun, aksi ini berkembang menjadi aksi anarki yang meluas di berbagai pusat perdagangan Kota Surabaya dan melakukan kerusakan terhadap benda-benda dan kendaraan pribadi maupun umum. Massa liar melakukan kerusakan dan pembakaran yang secara spesifik menyasar aset dan properti milik warga keturunan Tionghoa (Ningsih & Husain, 2019). Dalam situasi politik Orde Baru yang menekankan stabilitas nasional, media massa membingkai aksi anarki ini kemudian tidak semata dipahami sebagai luapan emosi massa, tetapi dikaitkan dengan dugaan keterlibatan adanya unsur pengacau yang dianggap berupaya mengganggu ketertiban dan stabilitas keamanan kota.

Persuratkabaran pada rentang bulan Oktober hingga November tahun 1968, seperti harian Suara Merdeka dan Kompas merekam secara menyeluruh peristiwa tersebut. Pemberitaan surat kabar pada massa tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai cermin peristiwa yang terjadi, melainkan juga sebagai sarana untuk menyampaikan ideologi dan pembentuk wacana publik. Kehadiran pemberitaan yang muncul secara bersamaan mengenai kerusakan kendaraan, pembakaran, hingga pengumuman pembekuan organisasi pemuda menunjukkan adanya hubungan antara otoritas militer, massa pemuda, minoritas etnis, dan pers.

Kajian historiografi mengenai media sebagai sarana propaganda anti-komunis pada masa Orde Baru telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Kudri & Ciptadi (2023) menitikberatkan pada analisis diskursus pemberitaan komunisme dalam harian Kompas pra dan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965; Farinuddin (2023) mengkaji bagaimana surat kabar Berita Yudha digunakan sebagai alat untuk melawan propaganda komunis; Choirudin (2023) berfokus pada surat kabar Angkatan Bersendjata dengan perannya sebagai media agitasi politik dalam mendukung agenda militer pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965; sementara Hautama et. al (2025) menunjukkan bahwa majalah Kiblat berfungsi sebagai media propaganda yang mengkonstruksi komunisme sebagai ancaman terhadap agama dan negara. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bagaimana pers digunakan sebagai alat legitimasi politik dan pembentuk narasi anti-komunisme pasca 1965.

Kajian historiografi mengenai kekerasan dan penumpasan kelompok komunis di Jawa Timur telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh G. T. Leksana (2021;2023) mengungkap bagaimana ingatan atas kekerasan anti-kiri 1965-1966 di Jawa Timur, seperti di kawasan pedesaan Malang tertanam dan membekas trauma atas kekerasan serta tidak sepenuhnya ada dalam narasi negara; Mintaji (2021) mengkaji pengalaman eks-tahanan politik (eks-tapol) yang pernah ditahan karena dituduh memiliki keterkaitan dengan PKI; Hearman (2024) mencatat bahwa Jawa Timur menjadi kawasan pertahanan terakhir dan paling gigih bagi sisa-sisa kekuatan kiri, dengan operasi penumpasan militer termasuk Operasi Trisula di Blitar Selatan. Kajian-kajian tersebut membahas ingatan dan mengungkap kekerasan anti-komunis dan dampaknya terhadap masyarakat serta penyintas di Jawa Timur periode 1965-1998, menggambarkan betapa sensitifnya isu stabilitas keamanan pada masa Orde Baru.

Berpijak pada tinjauan literatur tersebut, kajian mengenai hubungan antara peristiwa Surabaya Oktober 1968 dan konstruksi pemberitaan dalam surat kabar masih terbatas. Penelitian

ini tidak hanya berupaya merekonstruksi kronologi Peristiwa Surabaya Oktober 1968, tetapi juga menganalisis bagaimana peristiwa tersebut diberitakan dan dimaknai oleh surat kabar. Sehingga, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai peristiwa Surabaya Oktober 1968 dalam konteks dinamika politik pasca-1965 diarahkan pada bagaimana peristiwa tersebut dikonstruksi melalui teks berita, terutama dalam kaitannya dengan representasi ancaman, stabilitas, serta dugaan keterlibatan unsur komunis. Penelitian ini membahas kronologi peristiwa, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana surat kabar memberitakan dan membingkai peristiwa tersebut. Melalui analisis terhadap arsip surat kabar sezaman, penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksi fakta sejarah sekaligus menunjukkan bagaimana jalinan antara pers, militer, dan massa bekerja dalam kondisi politik awal Orde Baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan prosedural, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Wasino & Hartatik, 2018). Tahap heuristik atau pengumpulan sumber terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa surat kabar sezaman, yaitu surat kabar Suara Merdeka dan surat kabar Kompas. Surat kabar Suara Merdeka peneliti memperoleh edisi 22-26 Oktober 1968, 29-20 Oktober 1968, 1 November 1968, 6-7 November 1968, dan 9 November 1968 menggunakan surat kabar asli yang diakses di Depo Arsip Suara Merdeka dan dilakukan alih media menggunakan kamera handphone. Sementara itu surat kabar Kompas dari edisi 24-26 Oktober 1968, 28-29 Oktober 1968, 6 November 1968, dan 8 November 1968 menggunakan file digital yang diunduh melalui KompasData. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan situs web yang terkait dengan topik yang diteliti.

Tahap verifikasi atau kritik sumber terdiri dari dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan peneliti untuk memastikan keaslian sumber dari segi fisik, seperti kesesuaian edisi, dan tahun penerbitan. Sehingga menunjukkan bahwa surat kabar tersebut benar berasal dari periode tahun 1968. Adapun kritik internal dilakukan untuk menguji isi berita melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk menganalisis bagaimana peristiwa Surabaya Oktober 1968 direpresentasikan dalam teks berita, termasuk melihat kecenderungan, sudut pandang, serta kemungkinan adanya bias dalam penyampaian informasi. Hal ini turut menentukan cara media menyeleksi, memposisikan, serta menyajikan berita kepada audiens (Kudri & Ciptadi, 2023).

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui proses heuristik dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan data dari berbagai sumber untuk memahami dinamika Peristiwa Surabaya Oktober 1968 serta perbedaan *framing* antara surat kabar Suara Merdeka dan Kompas. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks politik Indonesia pasca-1965, berkembangnya narasi anti-komunisme, serta kondisi sosial masyarakat pada masa awal Orde Baru.

Tahap historiografi menjadi tahap terakhir yang berupa proses penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis dan kronologis. Pada tahap ini, seluruh data dan hasil analisis disusun menjadi artikel ilmiah yang membahas perubahan demonstrasi menjadi tindakan anarki dalam Peristiwa Surabaya Oktober 1968 serta bagaimana surat kabar membingkai peristiwa tersebut melalui pemberitaan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Peristiwa Surabaya Oktober 1968

Peristiwa Surabaya Oktober 1969 tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966), terjadinya insiden pengeboman gedung MacDonald House di Orchard Road, Singapura, hingga menewaskan tiga warga sipil pada 10 Maret 1965. Aksi tersebut dijalankan oleh dua anggota Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), yaitu Usman dan Harun. Keduanya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Singapura meski mereka

berdalih bertindak sebagai prajurit yang menjalankan perintah negara, bukan sebagai pelaku teror perorangan. Berbagai upaya diplomatik Indonesia untuk membebaskan dua anggota tersebut, mulai dari lobi Menteri Luar Negeri Adam Malik, permohonan keringanan hukuman oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hingga utusan pribadi Presiden Soeharto pun tidak membuahkan hasil, dan hukuman mati (eksekusi gantung) tetap dilaksanakan di Penjara Changi pada 17 Oktober 1968 (Merdeka, 1968b).

Sejak tersiarnya kabar bahwa hukuman gantung terhadap Harun dan Usman tetap dilaksanakan, suasana di dalam negeri dipenuhi oleh rasa duka (Sutjiatiningsih & Suyanto, 1983). Jenazah Usman dan Harun dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan penghormatan militer penuh, dan disaksikan ratusan ribu warga Jakarta, serta keduanya kemudian dianugerahi status Pahlawan Nasional (Saefudin, 2017). Menurut Sutjiatiningsih & Suyanto (1983), kabar eksekusi ini kemudian menyulut kemarahan luas di berbagai kota Indonesia, terutama di kalangan pemuda. Dalam situasi tersebut, para pemuda cenderung bertindak berdasarkan emosi tanpa mempertimbangkan secara matang akan konsekuensinya. Tindakan yang dilakukan lebih didorong oleh luapan perasaan dan dorongan hati yang kuat, dengan tujuan utama untuk meluapkan rasa ketidakpuasan mereka.

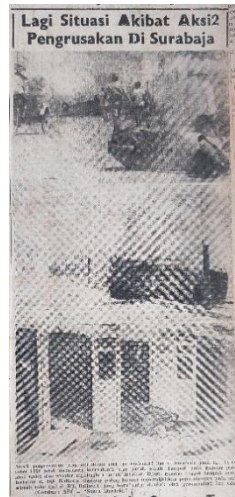
Demikianlah yang terjadi di Jakarta, sekelompok pemuda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar mendatangi Kantor Kedutaan Singapura di Jalan Indramayu dan melakukan perusakan terhadap bangunan, perabot, serta dokumen yang ada di dalamnya. Aksi serupa juga terjadi di beberapa rumah kediaman staf kedutaan di Jalan Maluku, Jalan Jambu, dan Jalan Imam Bonjol. Meskipun lokasi-lokasi tersebut telah dikosongkan dan dijaga oleh aparat keamanan, massa tetap melakukan tindakan pengrusakan. Aksi pengambilalihan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Jalan Proklamasi. Rumah tersebut didatangi oleh berbagai kelompok pemuda, termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Di tempat ini, simbol-simbol yang berkaitan dengan Singapura dirusak dan dibakar (Kami, 2014).

Reaksi serupa juga terjadi di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Di Surabaya, kemarahan tersebut disalurkan melalui Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), organisasi pemuda dan pelajar yang sejak tahun 1966 menjadi salah satu kekuatan penekan utama dalam pembubaran PKI dan proses pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto (Erlina, 2020). Pada Senin, 21 Oktober 1968, massa pemuda, pelajar, dan mahasiswa Surabaya berkumpul di Jalan Pemuda, menggelar apel belasungkawa untuk Usman dan Harun, kemudian massa melakukan *long march* menuju kediaman Kodam VIII/Brawijaya, Mayor Jenderal M. Jasin, di Jalan Raya Darmo. Kemudian dilanjutkan ke markas KKO wilayah Timur di kawasan Gubeng, untuk menyuarakan resolusi protes atas tindakan pemerintah Singapura (Kompas, 1968e; Merdeka, 1968e).

Seluruh rangkaian aksi demonstrasi tersebut berlangsung tertib dan bahkan mendapat izin serta pengawalan dari aparat keamanan. Hal ini juga ditegaskan dalam pemberitaan surat kabar yang menyebutkan bahwa *"Terhadap demonstrasi itu sendiri setjara terus terang ABRI menjetudjui karenanja memberikan idjin kepada KAPPI serta memberikan petundjuk2 jang oleh pemimpin KAPPI disanggupi untuk dilaksanakan sebaik baiknya"* (Merdeka, 1968f). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tahap awal, demonstrasi masih berada dalam keadaan yang terorganisasi dan terkendali.

Demonstrasi pada 21 Oktober 1968 berlangsung pada pukul 08.30 hingga 11.00 WIB, dengan situasi di Kota Surabaya masih relatif terkendali (Merdeka, 1968i). Peralihan situasi terjadi setelah massa KAPPI membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB dan hendak kembali ke markasnya di Jalan Pemuda (Kompas, 1968e). Berdasarkan laporan yang dihimpun surat kabar Suara Merdeka dan Kompas, sekelompok orang tidak diketahui asal-usulnya mulai melakukan perusakan terhadap kendaraan bermotor di sepanjang rute yang dilalui demonstran. Tindakan ini diawali dengan membalikkan dan membakar mobil serta sepeda motor, kemudian meluas menjadi perusakan, penjarahan dan pembakaran toko-toko, serta rumah-rumah dan tempat usaha milik keturunan tionghoa (Merdeka, 1968c, 1968e).

Koresponden Kompas mencatat bahwa tanda-tanda kerusuhan sebenarnya telah muncul sejak massa berada di Jalan Urip Sumoharjo, ditandai dengan dihancurkannya tiga buah mobil dan satu sepeda motor. Namun, pembakaran tersebut mulanya dianggap tidak berarti. Para demonstran terus berjalan menuju kediaman Mayjen M. Jasin. Memasuki pukul 12.00 WIB, sekelompok orang yang disebut sebagai “gerombolan liar” bersenjata kayu, pentungan, dan senjata tajam bergerak menyerbu ke pusat-pusat perdagangan Kota Surabaya di Jalan Tunjungan, Pasar Atom, Pasar Turi, Blauran, Kedungdoro, Pasar Kupang, Jalan Diponegoro, Keputran hingga Wonokromo di bagian selatan kota (Adi, 1968a; Merdeka, 1968c). Perusakan dan pembakaran kemudian menyebar dengan cepat dalam waktu kurang dari enam jam. Kota Surabaya mengalami kerusakan fisik yang luas akibat perusakan dan pembakaran yang terjadi.



Gambar 1. Kondisi Kota Surabaya Pasca Peristiwa
(Sumber: (Adi, 1968b))



Gambar 2. Massa kerusuhan Surabaya
(Sumber: (Adi, 1968a))

Respons aparat datang dengan cepat namun dengan konsekuensi berat. Ketika kerusuhan tidak kunjung mereda, Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Acub Zainal pada pukul 15.00 dihari yang sama mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap para pelaku yang melakukan aksi anarki. Hal ini didasari dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima Kodam VIII/Brawijaya Nomor 06/1968.

“Menurut Dan Rem ada tiga kategori dalam mengambil tindakan2 ini, ialah orang2 yang bisa diperingatkan secara halus ada orang2 yang hanya bisa diperingatkan dengan kekerasan dan ada orang2 yang hanya bisa diperingatkan dengan pelor (peluru) untuk mengirim mereka itu kealam lain. Hukum tembak ini tetap akan dilaksanakan terhadap siapapun dan dari golongan manapun yang akan mengacau. Hukum tembak ini tetap akan dilaksanakan terhadap siapapun dan dari golongan manapun yang akan mengatjau.” (Merdeka, 1968f).

Akibat penerapan perintah tembak tersebut, tiga orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan tewas ditembak ditempat, semetara puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Dalam menjaga stabilitas dan keamanan kota juga dilakukan dengan cara memberlakukan jam malam di Kota Surabaya dari pukul 18.00 hingga 05.00 terhitung pada 21 Oktober 1968. Disusul dengan larangan untuk sementara waktu segala bentuk demonstrasi, pawai, dan rapat umum (Merdeka, 1968a). Kemudian secara bertahap dipersingkat seiring membaiknya situasi keamanan, hingga akhirnya dicabut sepenuhnya pada 25 Oktober 1965.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa perubahan dari aksi yang bersifat solidaritas menjadi tindakan anarkis ini tidak dapat dipahami sebagai peristiwa spontan semata. Faktor-faktor seperti akumulasi kesenjangan sosial-ekonomi, kekecewaan pemuda pasca-1965, serta keterlibatan unsur-unsur provokator dari kelompok marjinal. Dalam konteks politik saat itu, situasi tersebut juga membuka ruang bagi munculnya kecurigaan terhadap adanya keterlibatan unsur-unsur tertentu yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas (Farchan, 2022). Hal ini sejalan dengan kondisi pasca operasi trisula di Blitar Selatan, saat negara dan aparat keamanan masih menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan muncul kembali jaringan komunis. Oleh karena itu, setiap bentuk mobilisasi massa yang berkembang di luar kendali dengan mudah dipresepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Laporan pers juga mengungkapkan bahwa diantara para pelaku kerusakan terdapat gelandangan, kelompok kriminal perkotaan, serta anak-anak kecil yang dimajukan untuk dijadikan perisai saat berhadapan dengan aparat keamanan (Kompas, 1968f).

Dampak Peristiwa Surabaya Oktober 1968

Dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa anarki di Kota Surabaya pada 21 Oktober 1968 mencakup kerugian material yang masif dari kelumpuhan roda perekonomian, hingga tindakan represif militer yang memengaruhi kondisi keamanan kota. Data resmi Komando Korem 084/Bhaskara Jaya dan Pemerintah Kotamadya Surabaya, sebagaimana dipublikasikan oleh surat kabar Suara Merdeka dan surat kabar Kompas pada rentang 24 Oktober – 9 November 1968, menunjukkan kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Rincian mengenai kerusakan fisik dan korban jiwa selanjutnya disajikan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Rangkuman Kerusakan Materil Akibat Peristiwa Surabaya Oktober 1968

No	Kategori Dampak	Jumlah
1	Korban Jiwa & Luka-Luka	3 orang tewas (ditembak mati), 26 luka-luka (2 luka berat)
2	Toko/Tempat Usaha	444-511 unit
3	Rumah Tinggal	71 unit
4	Perusahaan/Industri	9 unit
5	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil Mewah/Umum)	98 unit
6	Kendaraan Bermotor Roda Dua (Scooter/Sepeda Motor)	176 unit
7	Bemo	
8	Sepeda Biasa	4 unit
9	Becak	660 unit
10		48 unit

Sumber: Laporan Resmi Danrem 084 Kol. Acub Zaenal dalam Suara Merdeka dan Kompas, 24-26 Oktober 1968.

Dampak ekonomi jangka pendek dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Surabaya. Selama tiga hari pasca kejadian, yaitu pada 21 -23 Oktober 1968, aktivitas perniagaan lumpuh total ditambah lagi dengan adanya jam malam yang berlaku dari jam 18.00 hingga jam 05.00 WIB (Kompas, 1968f). Kondisi ini bahkan digambarkan dalam pemberitaan surat kabar Suara Merdeka yang menyoroti dampaknya terhadap kelompok masyarakat kecil sebagai berikut:

"Terutama tukang2 betjak jang mengeluh akibat adanya djam malam. Djuga pedagang2 ketjil ikut djadi korban karena pembeli sepi. Pendeknja akibat pengrusakan ini sangat terasa sekali terutama dibidang ekonomi. Mengenai harga barang2 kebutuhan sehari2 tampak ada tendensi menaik, djuga barang2 mewah diperkirakan pasti akan mengalami kenaikan djuga."(Merdeka, 1968i).

Kerugian yang paling besar dialami oleh warga keturunan Tionghoa. Mereka menjadi kelompok yang paling terdampak secara ekonomi, terutama karena banyak yang berprofesi sebagai pedagang di pusat-pusat kota. Meskipun sebagian berhasil menyelamatkan barang dagangannya, kerugian tetap terjadi akibat penutupan usaha selama beberapa hari pasca peristiwa 21 Oktober 1968. Kondisi ini berkaitan dengan posisi mereka yang sejak lama mendominasi sektor perdagangan di kawasan perkotaan Jawa Timur (Ningsih & Husain, 2019). Hal ini terlihat dari kisah seorang pedagang kain yang diliput dalam berita surat kabar Suara Merdeka di Pasar Atom yang berhasil selamat dari tindakan-tindakan anarki tersebut. Ia menyatakan *"Tetapi tidak mengapa Pak saja rugi sedikit asalkan dagangan kain saja ini bisa selamat, sebab kalau tidak sudah tentunja mendjelang hari2 lebaran rakjat sendiri jang rugi kalau ini"*. Pernyataan pedagang bernama Tan (Tondowidjojo) tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas (Merdeka, 1968m). Pemberitaan yang sama juga menunjukkan bahwa meskipun secara umum kota Surabaya digambarkan telah pulih, dampak sosial dari peristiwa tersebut masih dirasakan oleh warga keturunan Tionghoa. Mereka digambarkan masih diliputi rasa takut ketika melihat orang-orang bergerombol dan belum sepenuhnya kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kerusuhan tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek psikologis.

Dampak selanjutnya dari Peristiwa Surabaya Oktober 1968 adalah meningkatnya tindakan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam demonstrasi dan kerusuhan. Jumlah orang yang ditangkap atau ditahan dalam pemberitaan surat kabar menunjukkan angka yang berbeda. Surat kabar Kompas pada 24 Oktober 1968 melaporkan bahwa sebanyak 141 orang ditangkap dalam demonstrasi gelombang kedua dan sebagian besar bukan berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa (Kompas, 1968b). Pada tanggal yang sama, surat kabar Suara Merdeka menyebutkan bahwa hingga saat itu terdapat 167 orang yang telah ditahan, dengan delapan orang di antaranya disebut memiliki indikasi keterlibatan dengan G30S/PKI (Merdeka, 1968d). Sementara itu, dalam pemberitaan surat kabar Suara Merdeka dan Kompas tanggal 26 Oktober 1968, jumlah orang yang ditahan disebut mencapai 176 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang disebut memiliki indikasi keterlibatan dengan PKI, sedangkan tujuh orang lainnya dikirim ke *Combat Intelligence* untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut (Kompas, 1968e; Merdeka, 1968k). Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penangkapan dalam pemberitaan tidak disajikan secara seragam dan kemungkinan berkaitan dengan perbedaan waktu pelaporan maupun cakupan orang yang dihitung. Meskipun demikian, rangkaian pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa penangkapan menjadi salah satu langkah utama aparat dalam mengendalikan situasi pasca-kerusuhan sekaligus melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.



Gambar 3. Penangkapan Massa Pasca Peristiwa
(Sumber: (Adi, 1968c)

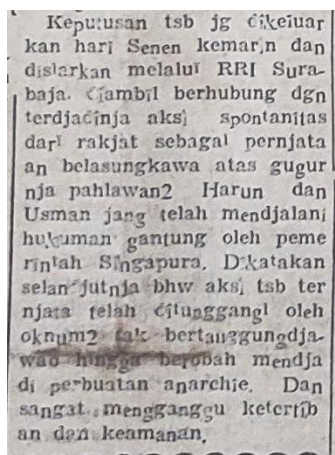
Secara politik, peristiwa Surabaya turut memberi dampak pada penguatan kekuasaan aparat keamanan di Jawa Timur. Pembekuan sementara KAPPI Surabaya sejak 23 Oktober 1968, disertai penyiwaan dan penyegelan markasnya di Balai Pemuda oleh Kodim 0831 (Kompas, 1968c; Merdeka, 1968g). Diikuti dengan diturunkannya papan nama karena dinilai telah membiarkan organisasinya ditunggangi oleh gerombolan liar. Organisasi kepemudaan yang sebelumnya mendapat dukungan militer untuk menyalurkan sentimen anti-konfrontasi terhadap Singapura, dalam waktu singkat justru dijadikan objek kecurigaan dan pengawasan ketat setelah dianggap gagal mengendalikan massanya. Kondisi ini mencerminkan karakter awal Orde Baru yang digambarkan represif, dominan, dan mengandalkan kekuatan militer sebagai instrumen utama menjaga stabilitas. Adanya narasi “penunggang PKI” yang diletakkan pada peristiwa Surabaya juga menjadi salah satu contoh bagaimana stigma anti-komunis pasca G30S dipakai secara luas untuk melegitimasi tindakan represif aparat.

Pemberitaan Peristiwa Surabaya Oktober 1968 dalam Surat Kabar

Media massa memiliki peran penting dalam setiap peristiwa, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk cara suatu peristiwa dapat dipahami oleh publik (Farinuddin, 2023). Informasi yang disampaikan media tidak sepenuhnya netral, dilakukan melalui proses pemilahan, penaknaan, dan penyusunan ulang fakta sehingga menghasilkan sudut pandang tertentu. Media tidak hanya merekam realitas, tetapi juga mengonstruksi makna atas realitas tersebut. Sehingga, apa yang ditampilkan, disembunyikan, atau ditekankan oleh media akan memengaruhi cara masyarakat menafsirkan suatu peristiwa (Peranginangin et al., 2025).

Pada masa Orde Baru, peran tersebut semakin terkait erat dengan kepentingan politik kekuasaan. Surat kabar sebagai bagian dari sistem media tersebut, beroperasi dalam batasan yang mensyaratkan keselarasan dengan narasi resmi pemerintah. Pada periode 1966 hingga awal 1970-an media masih relatif diberi ruang gerak dengan kebebasan bersifat terbatas dan bersyarat. Pemberitaan tetap dituntut untuk berjalan seiring dengan garis politik negara, khususnya dalam mendukung wacana anti-komunisme dan menjaga stabilitas nasional (Zainal, 2019).

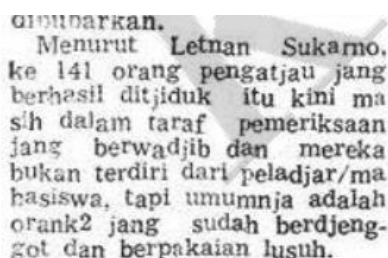
Jika dibaca secara kronologis, pemberitaan mengenai Peristiwa Surabaya yang terjadi pada 21 Oktober 1968, menunjukkan perubahan pola framing yang semakin mengarah pada penguatan narasi anti-komunis. Hal ini terlihat pada pemberitaan awal tanggal 22 Oktober, perhatian media masih tertuju pada langkah-langkah pemerintah dalam mengendalikan situasi, seperti pemberlakuan jam malam dan larangan demonstrasi. Namun, sejak awal sudah muncul kerangka penjelasan yang kemudian terus digunakan dalam pemberitaan berikutnya. Aksi yang pada mulanya dipandang sebagai demonstrasi spontan rakyat disebut telah “ditunggangi oleh oknum2 tak bertanggungjawab” (Merdeka, 1968a).



Gambar 4. Berita Suara Merdeka edisi 23 Oktober 1968
(Sumber: (Merdeka, 1968a))

Istilah “ditunggangi” dan “oknum tak bertanggungjawab” kemudian muncul berulang kali dalam pemberitaan selanjutnya. Penggunaan istilah tersebut secara perlahan menggeser perhatian dari massa KAPPI sebagai pelaku utama demonstrasi kepada pihak lain yang dianggap berada di balik kerusuhan. Dalam konteks politik Orde Baru pasca-1965, arah tuduhan tersebut kemudian mengarah pada kelompok yang telah lama ditempatkan sebagai musuh negara, yaitu PKI.

Pada 23 Oktober, pemberitaan mulai menyinggung adanya kekerasan yang menasar warga keturunan Tionghoa. “Sementara itu Reuter Djakarta mengabarkan hari Selasa kemaren, bahwa demonstrasi2 tadi pada sementara bagiannya telah berubah menjadi eksekusi anti Tionghoa. Sementara rumah2 dan tempat2 usaha orang2 Tionghoa diabrak-abrik dan isi rumah dikeluarkan serta dimusnahkan.”(Merdeka, 1968c). Pada saat yang sama, perhatian juga diberikan pada penjelasan bahwa demonstrasi telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, perhatian pembaca secara perlahan diarahkan dari persoalan kekerasan terhadap kelompok tertentu menjadi pertanyaan mengenai siapa yang dianggap berada di balik kerusuhan.



Gambar 5. Berita Surat Kabar Kompas edisi 24 Oktober 1968
(Sumber: (Kompas, 1968b))

Pada 24 Oktober, pemberitaan mulai memberikan informasi lebih rinci mengenai jumlah kerusakan dan orang-orang yang ditangkap. Surat Kabar Kompas melaporkan bahwa 141 orang yang ditangkap bukan berasal dari kalangan mahasiswa atau pelajar, melainkan sebagian besar digambarkan sebagai orang-orang dengan penampilan yang berbeda dari massa demonstran (Kompas, 1968b). Pemberitaan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk memisahkan kelompok pelajar dari yang melakukan tindakan anarki. KAPPI tetap ditempatkan sebagai kelompok pemuda yang melakukan demonstrasi dengan tujuan yang dianggap sah, sedangkan

pelaku pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan diarahkan kepada kelompok lain yang dicirikan melalui penampilan fisik. Adanya perubahan terminologi tersebut menciptakan pembagian moral antara dua kelompok. Pertama, demonstran yang dianggap memiliki tujuan resmi untuk menyampaikan belasungkawa dan protes terhadap tindakan pemerintah Singapura. Kedua, kelompok yang dianggap memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan kerusuhan.



Gambar 6. Berita Surat Kabar Suara Merdeka edisi 25 Oktober 1965
(Sumber: (Merdeka, 1968h))

Penguatan narasi anti-komunis semakin terlihat pada pemberitaan 25 Oktober. Pada hari tersebut, surat kabar Suara Merdeka menerbitkan laporan khusus mengenai "Peristiwa Surabaya" yang memuat keterangan dari Kolonel Acub Zaenal. Dalam laporan tersebut, muncul tuduhan mengenai keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sisa-sisa Gestapu/PKI. Penemuan pamflet berhuruf Tionghoa dijadikan bukti oleh militer untuk menyatakan bahwa RRT berupaya menghasut warga *Hoakiau* agar melawan pemerintah Republik Indonesia. Narasi tersebut disusul dengan kecenderungan untuk menyalahkan korban, khususnya warga keturunan Tionghoa.

"Para WNI harus adakan instropeksi. Dalam pada itu bagi WNI Keturunan Tionghoa jang sudah mendjadi bangsa Indonesia hendaknja mengadakan instropeksi terhadap tindakan sikapnja sehari2. Karena kebetulan bahwa para WNI keturunan Tionghoa ini adalah kebanyakan terdiri dari orang-orang jang mampu dan boleh dikata kaya, hendaknja djanganlah memamerkan kekajaanja secara berlebih2an terhadap mayoritas bangsa Indonesia jang umumnja ekonominnja lemah. Dengan sikap-sikap jang demikian ini akan dapat menimbulkan djurang jang dalam antara WNI Keturunan Tionghoa dan rakyat Indonesia pada umumnja, dimana perbedaan2 ekonomis ini akan dieksplorir oleh sisa-sisa G-30-S/PKI dan subversi lainnja untuk menimbulkan kekacauan. Peristiwa Surabaya hendaknja djadi peringatan bagi para WNI Keturunan Tionghoa jang notabene sudah memakai nama asli Indonesia ini untuk meninggalkan sifat2 eksklusifmenja dan sifat2 lain jang bisa menimbulkan perbedaan2 jang dapat memecah belah persatuan bangsa." (Merdeka, 1968h)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa warga keturunan Tionghoa etnis Tionghoa yang menjadi korban penjarahan dan pembakaran tidak diposisikan sebagai pihak yang berhak mendapat perlindungan negara, melainkan dihakimi sebagai pemicu kesenjangan ekonomi yang tindakannya mengeksploitasi mayoritas warga. Pola semacam ini menunjukkan bahwa pemberitaan dapat membentuk cara tertentu dalam melihat korban dan pelaku. Dalam konteks propaganda anti-komunis, kelompok yang dianggap memiliki hubungan dengan komunisme atau

kekuatan asing sering kali ditempatkan dalam posisi yang mencurigakan, meskipun hubungan tersebut belum tentu dibuktikan secara jelas (Aryani, 2022). Ketergantungan media terhadap narasumber tunggal aparat keamanan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan pers Indonesia pasca-G30S, ketika kebijakan pemerintah terhadap pers, meskipun secara normatif menjamin kemerdekaan penerbitan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, dalam praktiknya tetap diwarnai pengawasan ketat oleh aparat keamanan dan ancaman pembredelan bagi penerbitan yang dianggap membahayakan stabilitas nasional (Imron et al., 2016)

Pada 26 Oktober, Surat kabar Suara Merdeka dan Kompas secara serentak menurunkan berita penangkapan delapan orang yang dituduh sebagai gembong PKI. Di antara para tahanan tersebut, sorotan utama diarahkan pada pementasan sosok figuratif bernama Kardjimin, yang diklaim sebagai "*bekas algodjo Lubang Buaya*" pada peristiwa G30S tahun 1965 (Kompas, 1968d; Merdeka, 1968k). Penyebutan nama tersebut menghubungkan Peristiwa Surabaya dengan peristiwa G30S yang terjadi tiga tahun sebelumnya. Hubungan tersebut membuat kerusuhan di Surabaya tidak lagi dipahami sebagai peristiwa lokal yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar mengenai ancaman komunisme. Namun, pemberitaan tersebut tidak banyak memberikan penjelasan mengenai bukti keterlibatan Kardjimin dalam kerusuhan Surabaya maupun hubungan langsung antara peristiwa 1965 dan kerusuhan 1968. Militer memanfaatkan peristiwa Lubang Buaya sebagai instrumen untuk membenarkan pembersihan politik yang lebih luas di Jawa Timur, terutama setelah Operasi Trisula di Blitar Selatan.



Gambar 7. Kardjimin
(Sumber: (Merdeka, 1968l))

Pada edisi yang sama terdapat pandangan yang berbeda. Suara Merdeka memuat pernyataan Drs. Chalik Ali, anggota DPRGR dari Fraksi NU asal Jawa Timur, yang menegaskan bahwa "Peristiwa Surabaya bukan peristiwa rasialis". Menurutnya, peristiwa tersebut lebih tepat dipahami sebagai kemarahan spontan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik untuk kepentingan kriminal maupun politik (Merdeka, 1968j). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada masa awal Orde Baru masih terdapat ruang bagi perbedaan penafsiran mengenai suatu peristiwa. Meskipun narasi resmi mengenai anti-komunisme cukup kuat, tidak semua tokoh politik menerima begitu saja penjelasan bahwa kerusuhan tersebut semata-mata merupakan bagian dari konflik rasial atau gerakan politik tertentu. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ruang perdebatan dalam pers pada masa awal Orde Baru belum sepenuhnya tertutup, meskipun kebebasan tersebut kemudian semakin terbatas dalam perkembangan politik berikutnya.

Pemberitaan pada hari-hari berikutnya, yaitu antara 28 Oktober hingga 9 November, menunjukkan bahwa kerangka anti-komunis tetap dipertahankan. Surat kabar Kompas dan Suara

Merdeka pada 6-7 November memberitakan pembebasan 149 tahanan dan memuat pernyataan Kolonel Acub Zainal

"Sekarang ini, jang penting adalah djangan banyak ber-agitasi, karena perbuatan semacam itu sama dengan mengindjak-idjak Orde Baru. Bahkan memberikan peluang bagi PKI."(Antara, 1968; Kompas, 1968g).

Dua hari kemudian, Surat Kabar Kompas kembali memberitakan bahwa sekitar 600 orang di wilayah Kodam VIII/Brawijaya telah diamankan karena diduga berkaitan dengan G30S/PKI. Dalam pemberitaan tersebut, muncul pula kemungkinan keterlibatan Uni Soviet, meskipun tidak disertai bukti yang jelas (Kompas, 1968a). Sementara itu, surat kabar Suara Merdeka pada 9 November memberitakan kerugian akibat peristiwa 21 Oktober 1968 dan wawancara kepada korban yang terdampak peristiwa, lalu menutup rangkaian pemberitaannya dengan laporan

"Suasana kota Surabaya jg sudah pulih kembali kini sehari-harinja didjalan2 bahkan di gang2 telah dibisingkan oleh suara "Halo2" dari mobil2 Unit. Bemo2. Jang diberi pengeras suara jang saling mempropagandakan pertundjukan kesenian dan bioskop".
(Merdeka, 1968n).

Perbandingan surat kabar Suara Merdeka dan Kompas memiliki perbedaan dalam gaya pemberitaan, meskipun keduanya memperlihatkan kecenderungan yang sama dalam menampilkan narasi anti-komunis. Surat Kabar Suara Merdeka sebagai surat kabar regional cenderung menyajikan laporan yang lebih rinci mengenai kondisi di lapangan. Pemberitaannya banyak menggambarkan suasana kota, kerusakan yang terjadi, serta kondisi masyarakat setelah kerusuhan. Surat kabar ini juga memberikan ruang yang cukup besar bagi pernyataan aparat militer mengenai dugaan keterlibatan PKI dan RRT. Sementara itu, surat kabar Kompas lebih sering menggunakan gaya pemberitaan langsung dengan struktur yang lebih ringkas dan menekankan data kerugian, jumlah tahanan, serta pernyataan pejabat. Meskipun demikian, ketika aparat mulai menghubungkan peristiwa dengan sisa G30S/PKI, kerangka tersebut juga muncul dalam pemberitaan surat kabar Kompas. Perbedaan gaya ini dapat dikaitkan dengan karakteristik media regional yang cenderung lebih dekat dengan suasana lokal dan media nasional yang lebih menekankan penyajian berita secara ringkas dan terstruktur. Namun, dalam hal pembingkai politik, kedua surat kabar tetap berada dalam lingkungan wacana yang sama, yaitu kuatnya narasi anti-komunisme pada masa awal Orde Baru.

Secara keseluruhan, pemberitaan mengenai Peristiwa Surabaya Oktober 1968 menunjukkan tiga pola utama. Pertama, pemberitaan sangat bergantung pada sumber-sumber resmi, terutama aparat militer. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai jumlah kerugian, pelaku, dan penyebab kerusuhan sebagian besar disampaikan dari sudut pandang aparat, sementara suara korban dan masyarakat sipil relatif kurang mendapat ruang. Kedua, istilah ditunggangi dan tuduhan keterlibatan sisa G30S/PKI digunakan secara berulang untuk menjelaskan perubahan demonstrasi menjadi anarki. Kerangka tersebut membantu memisahkan demonstrasi awal KAPPI dari tindakan kekerasan yang terjadi setelahnya, sekaligus mengarahkan tuduhan kepada kelompok yang telah lama dianggap sebagai musuh politik negara. Ketiga, warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban ditempatkan dalam posisi yang tidak sepenuhnya sederhana. Mereka diakui sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi pada saat yang sama diminta melakukan introspeksi dan secara tidak langsung dikaitkan dengan kecurigaan terhadap RRT.

Dengan demikian, pemberitaan Peristiwa Surabaya Oktober 1968 tidak hanya berfungsi sebagai catatan mengenai sebuah kerusuhan. Pemberitaan juga menjadi ruang untuk membentuk pemahaman mengenai siapa yang dianggap bertanggung jawab, siapa yang menjadi korban, dan bagaimana negara seharusnya bertindak. Melalui dominasi sumber resmi, penggunaan istilah

penunggalan, serta pengaitan kerusuhan dengan PKI dan RRT, media turut membentuk narasi yang menempatkan anti-komunisme dan stabilitas sebagai kerangka utama dalam memahami peristiwa. Dalam konteks awal Orde Baru, konstruksi tersebut memperlihatkan bagaimana pemberitaan surat kabar dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pembentukan dan penguatan wacana politik negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai hambatan-hambatan seperti ini membuat pesan-pesan yang disampaikan media cenderung menjadi lunak sekalipun para pembaca membangun kemampuan yang semakin terasah untuk membaca hal-hal yang serba tersirat (Hill, 2011).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, Peristiwa Surabaya Oktober 1968 bermula dari demonstrasi pemuda dan mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap hukuman mati terhadap dua anggota KKO-AL, Harun dan Usman, oleh pemerintah Singapura. Demonstrasi tersebut kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang ditandai dengan pengrusakan, pembakaran, penjarahan, dan kekerasan terhadap sejumlah kelompok masyarakat. Pemberitaan surat kabar menunjukkan bahwa perubahan dari demonstrasi menjadi kerusuhan berlangsung dalam situasi politik yang masih diwarnai ketegangan pasca-G30S.

Dampak peristiwa tersebut terlihat dari kerusakan harta benda, korban jiwa, penangkapan sejumlah orang, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan aparat keamanan kemudian mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keadaan melalui penerapan jam malam, pembatasan kegiatan, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kerusuhan. Di sisi lain, peristiwa tersebut juga membawa dampak politik karena semakin memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman komunisme dan dugaan keterlibatan sisa-sisa G30S/PKI. Dengan demikian, dampak Peristiwa Surabaya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mengalami kerusakan dan kekerasan, tetapi juga berpengaruh terhadap cara pemerintah dan masyarakat memahami persoalan keamanan dan komunisme pada masa awal Orde Baru.

Pemberitaan surat kabar Suara Merdeka dan Kompas memperlihatkan adanya perubahan dalam cara Peristiwa Surabaya dijelaskan kepada pembaca. Pada awalnya, pemberitaan lebih banyak membahas demonstrasi, tindakan aparat, kerusakan, dan dampak kerusuhan. Namun, dalam pemberitaan berikutnya, muncul dugaan bahwa kerusuhan telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dan dikaitkan dengan sisa-sisa G30S/PKI serta kekuatan politik asing. Kedua surat kabar juga banyak menggunakan keterangan dari sumber resmi militer dalam menjelaskan penyebab dan pihak yang dianggap terlibat. Kondisi tersebut membuat sudut pandang aparat lebih dominan dibandingkan suara masyarakat sipil dan korban. Dalam kerangka pemberitaan tersebut, kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa menjadi salah satu bagian dari peristiwa yang kemudian ditempatkan dalam narasi politik yang lebih luas mengenai PKI, RRT, dan anti-komunisme.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Peristiwa Surabaya Oktober 1968 dalam pemberitaan surat kabar tidak hanya dipahami sebagai demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan, tetapi juga dikonstruksi sebagai bagian dari persoalan politik dan ancaman komunisme. Narasi anti-komunisme semakin menguat seiring dengan munculnya dugaan keterlibatan sisa G30S/PKI dalam pemberitaan. Temuan ini menunjukkan bahwa surat kabar pada masa awal Orde Baru memiliki peran dalam membentuk cara masyarakat memahami suatu peristiwa melalui pemilihan sumber dan sudut pandang tertentu. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan pemberitaan surat kabar lain serta menggunakan arsip pemerintah, dokumen militer, dan kesaksian masyarakat untuk melihat perbedaan antara narasi resmi dan pengalaman masyarakat dalam Peristiwa Surabaya Oktober 1968.

DAFTAR PUSTAKA

Adi. (1968a, October 25). Gerombolan Liar Sedang Beraksi. *Suara Merdeka*, 1.

- Adi. (1968b, October 25). Lagi Situasi Akibat Aksi2 Pengrusakan Di Surabaya. *Suara Merdeka*, 1.
- Adi. (1968c, October 25). Mereka Jang Diamankan. *Suara Merdeka*, 1.
- Antara. (1968, November 7). 149 Orang Jang Terlibat „Peristiwa 21 Oktober” Surabaya Dibebaskan. *Suara Merdeka*, 2.
- Aryani, M. K. (2022). Inpres No 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 01–12. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.21627>
- Asad, S. (2009). *Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan pemberontakan PKI sisa-sisanya (1965-1981)*. Pusjarah & Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB).
- Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 7(1), 95. <https://doi.org/10.25157/wa.v7i1.3253>
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adikari*, 1(3).
- Farinuddin, H. (2023). Pemberitaan Surat Kabar Berita Yudha dalam Melawan Propaganda Komunis Setelah Gerakan 30 September 1965. *Chronologia*, 5(2), 63–87. <https://doi.org/10.22236/jhe.v5i2.12363>
- Hill, D. T. (2011). *Pers Di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Imron, Sariyatun, & Yuniarto, T. (2016). Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Jurnal CANDI*, 13(1).
- Kami, I. M. (2014). *Begini Bentuk Kemarahan Rakyat Indonesia Saat Usman Harun Digantung*. detiknews. <https://doi.org/https://news.detik.com/berita/d-2494518/begini-bentuk-kemarahan-rakyat-indonesia-saat-usman-harun-digantung>
- Kompas. (1968a, October 8). 600 Warga Kodam VIII/Brawidjaja Diamankan 3 Pelaku ‘Peristiwa Surabaya’ Ditembak Mati Ditempat * Penjusun Teks Pidato Panglima Jassin Orang PKI. *Kompas*, 1.
- Kompas. (1968b, October 24). 141 Demonstran Liar di Surabaya ditangkap – Bukan Terdiri dari Mahasiswa/Peladjar. *Kompas*, 1.
- Kompas. (1968c, October 25). Kegiatan KAPPI Surabaya Dibekukan. *Kompas*, 1.
- Kompas. (1968d, October 25). Surabaya Menderita Kerugian Besar; 3 Pengatjau ditembak mati ditempat. *Kompas*, 1.
- Kompas. (1968e, October 26). Kehidupan Surabaya Mulai Pulih. *Kompas*.
- Kompas. (1968f, October 29). Mengapa KAPPI Surabaya Dibekukan? *Kompas*, 1.
- Kompas. (1968g, November 6). Demonstran2 “Peristiwa Sutrabaja” Dibebaskan. *Kompas*, 2.
- Kudri, P., & Ciptadi, S. G. (2023). Analisis Diskursus Berita Komunisme Harian Kompas Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Gerakan 30 September 1965. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(1), 96–113. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i1.5>
- Masril, M. A. (2020). *Pengaruh Komunisme di Indonesia*. Guepedia.
- Merdeka, S. (1968a, October 22). Djam Malam Di Surabaya; Dari 18.00-05.00 Mulai Kemarin. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968b, October 22). Usahakan Bebaskan Harun & Usman Dari Hukuman Mati Sdh. Diichtiarkan Setjara Maksimal. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968c, October 23). Demonstrasi Besar Meledak Di Kota Pahlawan. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968d, October 24). 3 Orang Ditembak Mati Ditempat Di S’rabaja. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968e, October 24). Sampai Kemarin Suasana Surabaya Masih Sepi. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968f, October 25). *Ada Bukti2 „Peristiwa Surabaya” Sudah Lama Dipersiapkan*. 1.
- Merdeka, S. (1968g, October 25). KAPPI Surabaya Utk. Sementara Dibekukan. *Suara Merdeka*, 3.
- Merdeka, S. (1968h, October 25). Kolonel Acub: RRT Mau Hasut W.N.I Agar Anti Indonesia. *Suara Merdeka*, 1.

- Merdeka, S. (1968i, October 25). Surabaya Pulih Kembali. *Suara Merdeka*, 1–3.
- Merdeka, S. (1968j, October 26). Chalik Ali: Peristiwa Surabaya Bukan Peristiwa Rasialis. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968k, October 26). Seorang Algodjo Lubang Buaja Ikut Pimpin „Geger Surabaya". *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968l, October 29). Kardjimin. *Suara Merdeka*, 1.
- Merdeka, S. (1968m, November 9). Saja Tetap Di Surabaya Dan Setia Pada Tanah Kelahiran Saja. *Suara Merdeka*, 2.
- Merdeka, S. (1968n, November 9). Surabaya Kini Dibisingkan Oleh Suara Mobil „Halo2". *Suara Merdeka*, 2.
- Ningsih, L., & Husain, S. B. (2019). *Komunitas Tionghoa dalam Pusaran Politik: Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Mojokerto, 1959-1980*. 14(2).
- Peranginangin, I. F. D., Lubis, P. R., & Batubara, M. Q. (2025). *Dinamika Media Massa dan Perubahan Sosial di Indonesia*. 9(2).
- Saefudin, A. (2017). Kontribusi Usman Janatin dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia, 1962-1966. *Jurnal Artefak*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.25157/lja.v4i2.903>
- Sutjiatiningsih, S., & Suyanto. (1983). *Harun*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumantasi Sejarah Nasional.
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.
- Zainal, B. (2019). Pengaruh Media Terhadap Pemerintahan dan Politik Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi. *At-Tabayyuan: Journal Islamic Studies*, 99–114.